

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPPPA Provinsi Sumsel

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, Tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka--Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, khususnya upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan, semaksimal mungkin melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta mewujudkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan kebutuhan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi 1 yaitu : **Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.**

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 3) Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatnya Budaya Literasi di Sumatera Selatan
- 5) Meningkatnya Derajat Kesehatan
- 6) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan
- 7) Meningkatnya Kesenjangan Gender**
- 8) Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tujuan I Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

- Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan;
- 1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
- 1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut :



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2030 DPPPA Prov. Sumsel

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,479	0,465	0.453	0.441	0.428	0.416	0.403	Indikaor negatif
Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,87	93,93–93,99	93,99–94,10	94,07–94,18	94,13–94,21	94,19–94,29	94,25–94,38	Indikaor positif
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	55,35%	57,12%	57,30%	57,50%	58,00%	58,50%	58,75%	Indikaor positif
		1.2 Meningkatkan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,90	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	Indikaor positif

		1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif
			Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DPPPA Provinsi Sumsel

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan serta anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana tindakan komprehensif yang menjadi pedoman pelaksanaan Renstra 2025–2029.

1. Optimalisasi Sumber Daya

- **Sumber Daya Manusia (SDM):**
Peningkatan kapasitas aparatur DPPPA melalui pendidikan dan pelatihan berbasis isu gender dan perlindungan anak, penguatan kompetensi pendamping korban, serta pembentukan jejaring relawan dan pekerja sosial.
- **Sumber Daya Keuangan:**
Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mengutamakan program prioritas, optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, serta mendorong kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan dunia usaha.
- **Sarana dan Prasarana:**
Modernisasi layanan UPTD PPA, pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan pengaduan online, serta

pembangunan pusat layanan ramah anak dan ramah perempuan di beberapa wilayah prioritas.

2. Tahapan Pelaksanaan

- Tahap Perencanaan: Analisis situasi dan kebutuhan berbasis data gender dan anak, integrasi dengan RPJMD Provinsi, serta penyusunan indikator kinerja yang terukur.
- Tahap Implementasi: Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dengan mekanisme kolaboratif lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
- Tahap Pengendalian: Pemantauan capaian indikator setiap tahun melalui Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), monitoring UPTD PPA, dan evaluasi reguler.
- Tahap Evaluasi dan Penyesuaian: Review strategi sesuai dinamika sosial, ekonomi, maupun kebijakan nasional agar tetap relevan dan adaptif.

3. Fokus Prioritas

- Pengarusutamaan Gender (PUG): Meningkatkan efektivitas pelaksanaan ARG (Anggaran Responsif Gender) dan Indeks Pembangunan Gender.
- Perlindungan Perempuan: Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi produktif, serta peningkatan akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan psikososial.
- Perlindungan Anak: Pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak, peningkatan kualitas Kabupaten/Kota Layak Anak, serta pemenuhan hak partisipasi anak.
- Penguatan Lembaga Layanan: Optimalisasi fungsi UPTD PPA sebagai pusat layanan terpadu yang mudah diakses, cepat, ramah, dan akuntabel.

4. Lokus Intervensi

- Wilayah: Kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kekerasan perempuan dan anak, daerah dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah, serta wilayah dengan angka perkawinan anak tinggi.
- Kelompok Sasaran: Perempuan korban kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, kelompok rentan (penyandang disabilitas, perempuan miskin, dan kelompok minoritas).

5. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

- Program Kesetaraan Gender: peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PUG, fasilitasi penyusunan ARG, serta penyediaan data terpilah gender dan anak.
- Program Perlindungan Perempuan: pelayanan pengaduan, penanganan kasus kekerasan berbasis gender, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Program Perlindungan Anak: fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak, pelayanan anak korban kekerasan, serta penguatan partisipasi anak melalui forum anak.
- Subkegiatan Operasional: sosialisasi, pendampingan, advokasi kebijakan, peningkatan layanan UPTD PPA, serta pemanfaatan media digital untuk edukasi masyarakat.

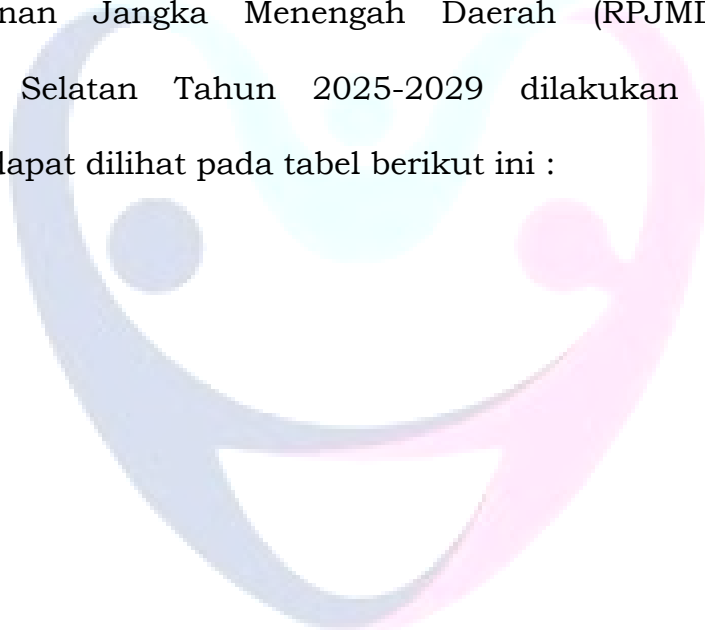
6. Mekanisme Adaptif Menghadapi Lingkungan Dinamis

- Regulasi: Penyesuaian program dengan kebijakan nasional (RPJMN, NSPK Kementerian PPPA) dan arah pembangunan provinsi.
- Perubahan Sosial: Respons cepat terhadap kasus kekerasan dan dinamika masyarakat dengan membangun sistem

layanan berbasis teknologi.

- Keterbatasan Anggaran: Optimalisasi kolaborasi multipihak (pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, dan komunitas).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diperlukan strategi dan kebijakan. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan penahapan tahunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.2 Penahapan Renstra DPPPA
Provinsi Sumatera Selatan**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Dasar: - Penyusunan regulasi teknis perlindungan perempuan & anak - Peningkatan kapasitas SDM UPTD PPA - Sosialisasi awal perlindungan perempuan dan anak - Penguatan sistem layanan pengaduan & rujukan	Perluasan Layanan: - Perluasan jangkauan layanan UPTD PPA di kabupaten/kota - Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi pelaporan & layanan online) - Penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga terkait - Penguatan data terintegrasi kasus perempuan dan anak	Penguatan Kualitas: - Evaluasi & penyempurnaan layanan perlindungan - Peningkatan standar mutu layanan UPTD PPA - Integrasi layanan dengan lembaga kesehatan, kepolisian, dan sosial - Peningkatan kampanye kesadaran masyarakat	Inovasi & Akselerasi: - Pengembangan inovasi program pemberdayaan perempuan - Penguatan perlindungan khusus anak (trafficking, eksploitasi, disabilitas) - Optimalisasi rehabilitasi sosial & reintegrasi korban - Monitoring dan evaluasi kinerja layanan berbasis outcome	Kemandirian & Keberlanjutan: - Kelembagaan DPPPA yang kuat & mandiri - Sistem perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi & berkelanjutan - Peningkatan kualitas hidup perempuan & anak melalui program berkelanjutan - Pencapaian target RPJMD/RPJPN terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak

DPPPA Sumsel memiliki fokus kebijakan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender melalui:

1. **Pengarusutamaan Gender (PUG)**, memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan memperhitungkan kebutuhan dan potensi perempuan dan laki-laki secara setara.

2. **Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan,** mengurangi dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, serta mencegah pernikahan usia anak.
3. **Pemberdayaan Perempuan,** terutama dalam aspek ekonomi (kewirausahaan), peran dalam pendidikan keluarga, serta peningkatan kemampuan dan partisipasi secara sosial, politik, dan hukum.
4. **Pemenuhan Hak Anak,** tumbuh kembang anak, akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, gizi), perlindungan dari bahaya sosial dan lingkungan.
5. **Peningkatan Kapasitas Data dan Kelembagaan,** memperkuat sistem data gender dan anak agar perencanaan & intervensi bisa tepat sasaran; memperkuat UPTD PPPA di kabupaten/kota; koordinasi antar lembaga daerah.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra DPPPA Sumse1

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPPPA	Ket
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Pemanfaatan Data Berbasis Gender	Penguatan sistem data terpilah menurut jenis kelamin dan usia serta pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan.	
2	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Perencanaan Responsif Gender di Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengarusutamaan gender dan penyusunan perencanaan serta penganggaran responsif gender.	
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Akses Perempuan ke Pekerjaan Layak	Fasilitasi peningkatan keterampilan perempuan dan perluasan kesempatan kerja yang layak dan adil.	
4	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan	Penguatan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan jaringan usaha.	
5	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Penerapan Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak	Peningkatan layanan kesehatan dasar, gizi, dan kesejahteraan anak termasuk pencegahan stunting.	
6	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Fasilitasi akses pendidikan ramah anak, penyediaan ruang bermain, serta pelibatan anak dalam kegiatan seni dan budaya.	
7	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan positif serta pengembangan layanan pengasuhan alternatif bagi anak terlantar.	

8	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak	Peningkatan partisipasi anak dalam forum anak dan penguatan kelembagaan perlindungan anak berbasis masyarakat.	
9	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Perlindungan terhadap Anak termasuk Disabilitas	Penyediaan layanan inklusif, pendampingan, serta advokasi pemenuhan hak anak disabilitas.	
10	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Perlindungan terhadap Anak Miskin dan Terlantar	Penguatan program perlindungan sosial, bantuan pendidikan, dan layanan dasar bagi anak miskin dan terlantar.	
11	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Pencegahan Kekerasan Anak	Sosialisasi, edukasi, dan kampanye perlindungan anak serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan.	
12	Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Anak	Optimalisasi layanan UPTD PPA, penyediaan rumah aman, serta pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan.	

